

**ANALISIS KETERKAITAN ANTAR SUBSISTEM DI DALAM
SISTEM AGRIBISNIS KAKAO (*Theobroma cacao* L.)
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

OLEH

AMELIA

07 114 027



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

ANALISIS KETERKAITAN ANTAR SUBSISTEM DI DALAM SISTEM AGRIBISNIS KAKAO (*Theobroma cacao* L.) DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ABSTRAK

Penelitian dilaksanakan bulan Mei – Juni 2011. Tujuan penelitian mendeskripsikan sistem agribisnis kakao di Kabupaten Padang Pariaman serta menganalisis keterkaitan antar subsistem dalam sistem agribisnis kakao di Kabupaten Padang Pariaman. Pengumpulan data dilakukan secara survei. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa keterkaitan subsistem hulu dengan subsistem usahatani dalam hal pengadaan bibit sudah ada melalui bantuan pemerintah. Dalam hal pengadaan pupuk dan obat-obatan keterkaitannya lemah karena pada umumnya petani jarang menggunakan pupuk dan obat-obatan, sedangkan untuk alat pertanian keterkaitannya kuat. Keterkaitan antara subsistem usahatani dengan subsistem hilir dengan kriteria kuat baik dari segi harga, kuantitas, kualitas dan waktu pemasaran. Keterkaitan antara subsistem agribisnis hulu, usahatani, dan subsistem hilir dengan sarana dan prasarana fisik (jalan, alat angkut dan komunikasi) memiliki keterkaitan sedang. Dimana kuantitas dan kualitas jalan sudah tepat, sedangkan transportasi kuantitas dan kualitasnya kurang. Pada komunikasi baik dari segi kuantitas dan kualitas masih kurang tepat.

Keterkaitan antara pelaku utama pada subsistem hulu dan subsistem hilir dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sudah ada keterkaitan dengan kriteria lemah. Keterkaitan kuat antara subsistem usahatani dengan Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan, Lembaga Penyuluhan Pertanian di Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Sungai Geringging, serta keterkaitan sedang dengan KPP dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk dapat tercapainya sistem agribisnis kakao yang kuat maka sebaiknya dilakukan pembuatan pupuk lokal di tingkat petani, memberikan insentif kepada petani yang melakukan proses fermentasi sempurna sesuai dengan yang dianjurkan. Sedangkan pada subsistem jasa penunjang disarankan pada Diskoperindag dan UKM untuk melakukan pengawasan pupuk, memberikan informasi pasar kepada petani dan memfasilitasi masuknya investor pengolahan biji kakao dan promosi keluar negeri.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut diantaranya penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi; penyerap tenaga kerja; sumber devisa negara; sumber pendapatan; serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan (Departemen Pertanian, 2009). Kontribusi devisa sektor pertanian di Indonesia dalam Total Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 14,5 persen terhadap nilai PDB nasional pada tahun 2008 dan meningkat pada catur wulan I tahun 2009 menjadi 15,3 persen berdasarkan harga konstan (Badan Pusat Statistik, 2009).

Sesuai dengan tujuan Pembangunan Pertanian Indonesia tahun 2010-2014 yaitu: 1) mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal, 2) meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan, 3) menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan, 4) meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian, 5) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Maka program pembangunan pertanian masa yang akan datang, diletakkan pada empat titik tumpu yaitu pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; peningkatan diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; dan peningkatan kesejahteraan petani (Departemen Pertanian, 2009)

Menurut teori pembangunan modern, makin maju suatu negara semakin kecil kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional. Makin besarnya kontribusi sektor pertanian suatu negara tidak berarti makin terbelakangnya negara tersebut dipandang dimata dunia. Sektor pertanian dipandang terbelakang jika pengusahaannya secara tradisional. Adanya suatu transformasi menuju pembangunan yang berbasis agribisnis dan agroindustri akan memberikan kontribusi yang lebih terhadap perekonomian negara. Pembangunan pertanian selama ini berorientasi kepada usahatani (*on farm agribusiness*) dengan sasaran utama peningkatan produksi dan kurang mengacu pada sistem agribisnis sehingga hasilnya tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya, baik terhadap perekonomian nasional maupun terhadap petani sebagai pelaku utama sektor ini, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya, baik terhadap perekonomian nasional maupun terhadap petani sebagai pelaku utama sektor ini.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1.Keadaan Geografis dan Tofografis

Kabupaten Padang Pariaman merupakan kabupaten yang terletak di wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat dengan luas 1328.79 km². Wilayah Kabupaten Padang Pariaman terbagi menjadi 17 kecamatan, dimana 2 x 11 Kayu Tanam yang memiliki jumlah luas terbesar (17.21 %) dan Sintuk Toboh Gadang dengan jumlah luas wilayah terkecil (1.92 %). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 11. Dari semua kecamatan yang ada dibagi lagi dalam nagari. Keseluruhan nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 46 dengan total jorong 367 (Tabel 3).

Secara geografis Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0⁰11' – 0⁰49" LS dan 98⁰360' – 100⁰28' BT. Sedangkan berdasarkan letak administratif Kabupaten Padang Pariaman berbatasan dengan Kabupaten Agam sebelah utara, disebelah selatan berbatasan dengan Kota Padang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar dan disebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Secara tofografi Kabupaten Padang Pariaman berada pada ketinggian 2 – 1000 meter diatas permukaan laut (m dpl) yang terdiri dari dataran rendah yang landai dan berbukit, curah hujan rata-rata per tahun antara 100 – 600 milimeter per tahun dengan suhu berkisar antara 25⁰ C – 26⁰ C.

Penggunaan lahan di Kabupaten Padang Pariaman sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian, dimana penggunaan lahan banyak digunakan oleh masyarakat untuk perkebunan rakyat (27.44 %) dan sawah (20.42 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 12.

4.1.2.Kondisi Demografi

Berdasarkan data tahun 2009, jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 392,941 orang dengan jumlah KK sebanyak 87,408. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 188,714 jiwa dan perempuan sebanyak 204,227 jiwa. Dimana sebagian besar penduduk di Kabupaten Padang Pariaman berada pada usia produktif. Jumlah penduduk umur 0 – 14 tahun berjumlah 143,568 orang, penduduk umur 15-29 tahun berjumlah 89,841 orang, penduduk umur 30-44 tahun berjumlah 69,284 orang. Penduduk umur 45-59 tahun berjumlah 49,391 orang, golongan umur 60 tahun keatas berjumlah 40,857 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Penduduk Berdasarkan Umur, tahun 2009 (jiwa)

Golongan Umur	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
0 - 14 tahun	73,551	70,017	143,568	36.54 %
15 - 29 tahun	42,228	47,613	89,841	22.86 %
30 - 44 tahun	32,152	37,132	69,284	17.63 %
45 - 59 tahun	23,299	26,092	49,391	12.57 %
60 tahun keatas	17,484	23,373	40,857	10.40 %
Jumlah	188,714	204,227	392,941	100 %

Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2010

Ditinjau dari segi mata pencaharian, sebagian besar penduduk hidup dari sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa dan angkutan. Mata pencaharian yang terbesar yaitu dari sektor pertanian yang terdiri dari pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan pertanian lainnya. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Penduduk Yang Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Padang Pariaman

Lapangan Usaha	Jumlah	Persentase
Pertanian, Perikanan, Perburuan dan Kehutanan	1,144	0.12 %
Pertambangan dan Penggalian	962	0.09 %
Industri Pengolahan	1,544	0.164 %
Transportasi, Penggudangan dan Komunikasi	1,354	0.14 %
Manajemen Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1,336	0.13 %
Jasa	1,703	0.109 %
Perdagangan Besar dan Eceran	1,335	0.132 %
Konstruksi	1,996	0.17 %
Jumlah	4,674	100 %

Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2010

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Kegiatan masing-masing subsistem di dalam sistem agribisnis kakao di Kabupaten Padang Pariaman diantaranya:
 - a. Kegiatan yang telah dilakukan pada subsistem agribisnis hulu dalam hal pengadaan dan penyaluran saprodi meliputi bibit, pupuk, obat-obatan serta alat dan mesin pertanian, dimana pengadaan bibit bersumber dari bantuan pemerintah. Namun pedagang saprodi tidak menyediakan pupuk kandang.
 - b. Kegiatan yang telah dilakukan pada subsistem usahatani kakao meliputi teknik budidaya oleh petani dimulai dari penanaman, pemeliharaan sampai panen dan pasca panen. Namun petani kurang memperhatikan kegiatan pemeliharaan (pemangkasan, pemupukan, penyiangan gulma).
 - c. Kegiatan yang telah dilakukan pada subsistem agribisnis hilir meliputi pengolahan biji kakao oleh petani secara tradisional dan pemasaran kakao dari petani, pedagang sampai ke konsumen. Namun petani tidak melakukan kegiatan fermentasi secara sempurna.
 - d. Subsistem lembaga jasa penunjang meliputi kebijakan pemerintah, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Diskoperindag dan UKM, Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga penyuluhan, dan lembaga keuangan. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi penyuluhan, pelatihan dan bantuan saprodi maupun penyediaan modal., serta pengadaan sarana dan prasarana fisik penunjang. Namun dari jumlah sarana dan prasarana yang telah disediakan pemerintah tidak mencukupi.
2. Keterkaitan antar subsistem di dalam sistem agribisnis kakao sebagai berikut:
 - a. Keterkaitan antara subsistem hulu dengan subsistem usahatani adalah sedang tetapi bervariasi antara kegiatan-kegiatannya. Dimana dalam pengadaan bibit keterkaitannya kuat, keterkaitan lemah dalam pengadaan pupuk, obat-obatan, dan keterkaitan kuat dalam pengadaan alat pertanian. Sedangkan antara subsistem hulu dengan subsistem jasa penunjang keterkaitannya sedang. Dimana pada sarana dan prasarana fisik keterkaitannya sedang, dan keterkaitan lemah dengan dinas koperasi perindustrian dan perdagangan dan UKM.

- b. Keterkaitan subsistem usahatani dengan subsistem hilir adalah kuat. Dimana dari segi pengolahan tidak ada keterkaitan karena belum ada pabrik pengolahan biji kakao menjadi produk sekunder di daerah penelitian. Dari segi pemasaran terjadi keterkaitan kuat karena secara umum pemasaran kakao di daerah penelitian sudah baik. Sedangkan antara subsistem usahatani dengan subsistem jasa penunjang keterkaitannya sedang. Dimana keterkaitan sedang dengan sarana dan prasarana fisik, dinas pertanian peternakan dan kehutanan, Diskoperindag dan UKM dan KPP, serta keterkaitan kuat dengan penyuluh pertanian.
- c. Keterkaitan subsistem hilir dengan subsistem jasa penunjang adalah sedang. Dimana keterkaitan lemah dengan Diskoperindag dan UKM serta keterkaitan sedang dengan sarana dan prasarana.

5.2. Saran

1. Kegiatan masing-masing subsistem di dalam sistem agribisnis kakao:
 - a. Pada subsistem hulu sebaiknya dilakukan pembuatan pembibitan ditingkat petani atau kelompok tani.
 - b. Pada subsistem on farm sebaiknya diberikan insentif untuk pemangkasan yang dilakukan oleh petani.
 - c. Pada subsistem hilir disarankan agar petani melakukan kegiatan fermentasi secara sempurna untuk meningkatkan mutu kakao.
 - d. Pada subsistem jasa penunjang sebaiknya pemerintah memperhatikan kecukupan sarana dan prasarana fisik penunjang demi kelancaran kegiatan setiap pelaku subsistem.
2. Saran untuk keterkaitan antar subsistem di dalam sistem agribisnis kakao:
 - a. Keterkaitan subsistem hulu dengan subsistem on farm sebaiknya dilakukan pembuatan pupuk lokal di tingkat petani. Sedangkan keterkaitan subsistem hulu dengan subsistem lembaga jasa penunjang disarankan pada Diskoperindag dan UKM untuk melakukan pengawasan pupuk.
 - b. Keterkaitan subsistem usahatani dengan subsistem hilir disarankan petani untuk berusaha meningkatkan produksi kakao dengan cara intensifikasi, memberikan insentif kepada petani yang melakukan proses fermentasi sempurna sesuai dengan yang dianjurkan. Sedangkan keterkaitan subsistem hulu dengan subsistem lembaga jasa penunjang disarankan pada Diskoperindag dan UKM untuk memberikan informasi pasar kepada petani

- c. Keterkaitan subsistem hilir dengan subsistem jasa penunjang sebaiknya Diskoperindag dan UKM untuk memfasilitasi masuknya investor pengolahan biji kakao dan promosi keluar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2009. *Sumatera Barat Dalam Angka 2004-2008*.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2009. *Padang Pariaman Dalam Angka 2004-2008*.
- [PPKKI] Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. 2005. *Pengolahan Produk Primer dan Sekunder Kakao*. PPKKI. Jember
- Departemen Pertanian. 2009. *Kebijaksanaan Strategis dan Program Pengembangan Produksi Perkebunan (Rencana Strategis dan Program Kerja tahun 2010-2014)*. Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan. Deptan. Jakarta
- Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat. 2010. *Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat*. Disbun Sumbar. Padang
- Downey, D dan S. P. Erikson. 1992. *Manajemen Agribisnis*. Erlangga. Jakarta
- Hernanto, F. 1991. *Ilmu Usahatani*. Penebar Swadaya. Jakarta
- Kartasapoetra, G, dkk. 1985. *Manajemen Pertannian (Agribisnis)*. PT Bina Aksara. Jakarta.
- Kasryno, Faisal. 1992. *Kebijaksanaan Strategis Pengembangan Agribisnis*, Makalah pada Seminar Nasional Pembangunan Pertanian pda PJP II diselenggarakan oleh PERHEPI tanggal 24-25 oktober 1992. Jakarta
- Krisnandhi, S. dan Samad, Bahrin. 1991. *Mengerakkan dan Membangun Pertanian/ A. T. Mosher*. CV. Yasaguna. Jakarta
- Mardjuki, Asparno. 1994. *Pertanian dan Masalahnya*. Andi Offset. Yogyakarta
- Mubyarto. 1979. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES. Jakarta
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta

